

## STRATEGI PENINGKATAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MELALUI MANAJEMEN PEMBIAYAAN

**Andayani**  
[yani69.ay@gmail.com](mailto:yani69.ay@gmail.com)

### Abstrak

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagai investasi baik bagi individu maupun masyarakat. Pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan swasta, sebagian dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan sebagian bersumber dari dana masyarakat, sehingga permasalahan penelitian adalah bagaimana lembaga pendidikan swasta dapat di *manage* secara tepat arah dalam hal mengembangkan mutu, relevansi, efisiensi dan efektivitasnya sehingga dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga pendidikan alternatif bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang upaya-upaya strategis lembaga pendidikan swasta dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pendidikan, dan informasi mengenai pengelolaan sumber dana pada lembaga pendidikan swasta, terfokus pada MI Ma'arif Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Temuan penelitian antara lain: *Pertama*, strategi yang dilakukan MI Ma'arif Sutawinangun untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan membentuk tim peningkatan mutu yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi mutu pendidikan di MI Ma'arif Sutawinangun. *Kedua*, pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif Sutawinangun dalam proses perencanaan pembiayaan telah melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak hal ini dilakukan untuk mengurangi beban biaya dalam penyelenggaraan pendidikan. Penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan yang telah sesuai dengan program pembiayaan yang telah ditetapkan merupakan faktor kunci terlaksana proses pendidikan di madrasah. MI Ma'arif Sutawinangun cenderung lebih memprioritas kebutuhan yang menunjang peningkatan mutu pendidikan agar pembiayaan dapat berjalan efektif dan efisien. *Ketiga*, dengan manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien, madrasah mampu merencanakan hal hal yang menunjang peningkatan mutu, pengadaan sarana prasarana yang menunjang pembelajaran, pengembangan diri guru serta prestasi akademik dan non akademik siswa.

**Kata kunci:** *Strategi, mutu, pembiayaan*

### A. Pendahuluan

Sepanjang sejarah pendidikan Islam di Indonesia, umat Islam senantiasa mengambil posisi terdepan dalam pendirian, pengembangan dan pemberdayaan

pendidikan keagamaan.<sup>1</sup> Salah satu bentuk peran serta umat Islam dalam pengembangan pendidikan keagamaan adalah dengan dibentuknya Madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan.

Sejalan dengan lahirnya pemikiran-pemikiran modern di kalangan umat Islam, maka terjadi pula pola pikir tentang pendidikan Islam. Tantangan zaman menuntut perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sistem pesantren dinilai oleh kalangan pembaharu sudah tidak sesuai lagi pada waktu itu. Dengan demikian perlu dilakukan pembaharuan dalam berbagai bidang. Pada masa itu timbulah lembaga sekolah dan Madrasah di samping pesantren yang sudah ada. Pada Pesantren, sistem pendidikan lama tetap dipertahankan, dan cenderung mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan saja, sedangkan sistem pendidikan Madrasah muncul dengan mengadopsi nilai-nilai pendidikan Barat.<sup>2</sup>

Pendidikan diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Konkretnya, pendidikan itu harus mampu menyiapkan tenaga yang terampil. Sementara itu, saat ini pendidikan nasional dihadapkan kepada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta terus berupaya mewujudkan amanat melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pembiayaan, pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Ada dua faktor yang menyebabkan mutu pendidikan selama ini kurang berhasil. *Pertama* strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*.

Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan dan membentuk kepribadian bangsa yang berbudi luhur serta mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu berkompetisi dalam persaingan dunia global. Untuk mencapainya dengan meningkatkan mutu pendidikan. Mulyasa menyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas ringan karena mencakup berbagai persoalan yang

---

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Kalimah, Cet. III, 2001), 149

<sup>2</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986), 123

<sup>3</sup> Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, 78

kompleks, yang menyangkut perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem sekolah.<sup>4</sup>

Lembaga pendidikan mengemban tugas penting, yakni bagaimana mengembangkan kualitas sumber daya manusia agar dapat berperan aktif dan tetap *survive* di era globalisasi. Hal ini tak bisa dipungkiri mengingat abad 21 sebagai era globalisasi dikenal dengan situasinya yang penuh dengan persaingan (*hypercompetitive situation*). John Naisbitt dan Patricia Aburdene, pernah mengatakan bahwa terobosan paling menggairahkan dari abad 21 bukan karena teknologi, melainkan karena konsep yang luas tentang apa artinya manusia itu.<sup>5</sup>

Pengembangan kualitas SDM bukan persoalan mudah dan sederhana, karena membutuhkan pemahaman yang mendalam dan luas pada tingkat pembentukan konsep dasar tentang manusia serta perhitungan yang matang dalam penyiapan institusi dan pembiayaan. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada keunggulan komparatif dengan lebih mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah, saat ini mulai mengalami pergeseran menuju pembangunan yang lebih menekankan keunggulan kompetitif. Dalam paradigma baru ini, kualitas SDM, penguasaan teknologi tinggi dan peningkatan peran masyarakat memperoleh perhatian.<sup>6</sup>

Ahmad Tafsir menyatakan bahwa untuk tercapainya sebuah Madrasah yang bermutu, dibutuhkan penguasaan teori pendidikan yang modern yaitu teori yang Islami dan sesuai dengan perkembangan zaman, serta tersedianya dana yang cukup. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, Madrasah sudah barang tentu memerlukan dana. Dana tersebut selanjutnya dikelola dan digunakan untuk pengadaan alat-alat, gaji guru, pemeliharaan alat-alat dan kebutuhan lain.<sup>7</sup>

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lainnya. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk tercapainya tujuan pendidikan.<sup>8</sup>

Komponen utama manajemen keuangan meliputi, (1) prosedur anggaran; (2) prosedur akuntansi keuangan; (3) pembelajaran, pergudangan dan prosedur pendistribusian; (4) prosedur investasi; (5) prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan

---

<sup>4</sup> Enco Mulyasa, Enco, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 21

<sup>5</sup> A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), 156

<sup>6</sup> A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, 156

<sup>7</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 23

<sup>8</sup> Enco Mulyasa, Enco, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 47-48

pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang diberi wewenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.<sup>9</sup>

Upaya meningkatkan mutu pendidikan merupakan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional di samping prioritas yang lainnya, yaitu penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan relevansi melalui kebijaksanaan keterkaitan dan kesepadanan.

Untuk mencapai peningkatan mutu yang sesuai dengan keinginan berbagai pihak salah satu faktor utama sangat berkaitan erat dengan masalah pembiayaan. Jadi, pembahasan masalah sumberdaya pendidikan, sarana dan prasarana itu tidak lepas dari masalah pembiayaan. Dalam hubungan ini, semakin besar jumlah biaya pendidikan itu akan lebih dimungkinkan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, apabila kita ingin meningkatkan mutu maka dana pendidikan itu haruslah berlipat ganda. Singkatnya, faktor biaya pendidikan adalah penting dan strategis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan bukanlah tugas ringan karena mencakup berbagai persoalan yang menyangkut tentang perencanaan, pendanaan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem sekolah.<sup>10</sup>

Penyelenggara pendidikan diharapkan mampu mengalokasikan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu upaya peningkatan mutu pendidikan perlu didukung kemampuan manajerial kepemimpinan. Hendaknya pengelola berupaya untuk mengatur sumber keuangan, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan merupakan potensi yang sangat urgen, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.<sup>11</sup>

Komponen pembiayaan pada sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan pendidikan dalam hal ini proses belajar mengajar. Setiap kegiatan pendidikan akan terlaksana jika manajemen pembiayaan pendidikan baik. Komponen pembiayaan akan menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Pengucuran anggaran yang lancar dari pemerintah, akan berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lain. Adanya keberagaman ini dipengaruhi oleh status sekolah, sumber daya manusia, lokasi serta jumlah peserta didik.

Ada beberapa alasan pentingnya manajemen pembiayaan pendidikan dalam mencapai kualitas pelayanan pendidikan antara lain: Menejemen Pembiayaan Pendidikan sangat membantu pengelolaan sumber keuangan organisasi pendidikan

---

<sup>9</sup> Enco Mulyasa, Enco, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 49

<sup>10</sup> Enco Mulyasa, Enco, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 20

<sup>11</sup> Enco Mulyasa, Enco, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 25

dalam menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat bagi pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Pelaksanaan MBS yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan dihadapkan pada keterbatasan dana.<sup>12</sup> Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan di dalam suatu organisasi. Jika suatu kegiatan dilaksanakan dengan biaya yang relatif rendah tetapi dapat produk yang berkualitas tinggi, maka hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.<sup>13</sup>

Dari paparan di atas tampak jelas bahwa manajemen keuangan merupakan suatu hal penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu peneliti ingin menggali informasi dan temuan hasil penelitian yang berkenaan dengan manajemen keuangan yang efektif dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan di MI Ma'arif Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Madrasah Ibtidaiyah merupakan ujung tombak dalam pendidikan dasar.

Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sutawinangun, sebagai salah satu lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Cirebon telah berhasil menunjukkan dirinya sebagai lembaga yang mampu memenej keuangan yang ada dengan baik sehingga menjadi MI Swasta bermutu. Hal ini bisa dibuktikan dengan diraihnya sertifikat akreditasi A tahun 2013, terus bertambahnya jumlah peserta didik, serta prestasi peserta didik baik akademik maupun non-akademik.

## **B. Strategi Perencanaan Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan melalui Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif Sutawinangun**

Pengertian mutu pendidikan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam arti normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai standar ideal. Sedangkan berdasarkan ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Adapun dalam arti deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan kenyataan misalnya hasil tes.<sup>14</sup> Dengan demikian, mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu.

Komponen yang terkait dengan mutu pendidikan adalah, *pertama* kesiapan dan motivasi siswa. *Kedua*, kemampuan guru profesional dan kerjasama dalam organisasi sekolah. *Ketiga*, kurikulum meliputi relevansi isi dan operasional proses pembelajarannya. *Keempat*, sarana prasarana meliputi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. *Kelima*, partisipasi masyarakat dalam pengembangan program pendidikan sekolah.

---

<sup>12</sup> Enco Mulyasa, Enco, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 48

<sup>13</sup> Martin, (2004). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo, (2004), 1

<sup>14</sup> Marus Suti. *Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Daerah*. Jurnal MEDTEK, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2011,5, 2

Pendekatan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu *pertama*, perbaikan secara terus menerus. Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan secara terus menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggaraan pendidikan telah mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Konsep ini senantiasa memperbaharui proses pendidikan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Jika tuntutan dan kebutuhan pelanggan berubah, maka pihak pengelola institusi pendidikan. Standar mutu pendidikan misalnya dapat berupa pemilihan atau akuisisi kemampuan dasar pada masing masing bidang pembelajaran, dan sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh.

*Kedua* pihak manajemen juga harus menentukan standar mutu materi kurikulum dan standar evaluasi yang akan dijadikan sebagai alat untuk mencapai standar kemampuan dasar. Standar mutu proses pembelajaran harus diterapkan dalam arti manajemen perlu menetapkan standar mutu proses pembelajaran yang diharapkan dapat berdaya guna untuk mengoptimalkan proses produksi dan untuk melahirkan produk yang sesuai yaitu yang menguasai standar mutu pendidikan berupa penguasaan standar kemampuan dasar. Pembelajaran yang dimaksud sekurang kurangnya memenuhi karakteristik, menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, kooperatif, kolaboratif, konstruktif dan pembelajaran tuntas.

*Ketiga*, perubahan kultur. Konsep ini bertujuan membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai orientasi semua komponen organisasi. Jika manajemen ini ditetapkan di institusi pendidikan, maka kepala madrasah harus membangun kesadaran semua pihak yang berkepentingan baik itu guru, siswa atau orang tua peserta didik akan pentingnya meningkatkan dan mempertahankan mutu pendidikan baik mutu hasil maupun mutu proses.

*Keempat*, perubahan organisasi, jika visi, misi dan tujuan organisasi berubah atau mengalami perkembangan maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan organisasi. Perubahan organisasi disini adalah perubahan struktur organisasi sehingga menyangkut perubahan tugas dan wewenang masing-masing personalnya. Kelima, mempertahankan hubungan dengan orang tua peserta didik karena lembaga pendidikan menghendaki agar para pelanggannya merasa puas. Sehingga diperlukan hubungan dan kerjasama yang baik antar kedua belah pihak.

## **C. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif Sutawinangun**

### *1. Perencanaan*

Perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin juga dipraktekkan oleh MI Ma'arif Sutawinangun. Dalam perencanaan keuangan madrasah, MI Ma'arif Sutawinangun dibawah pimpinan kepala madrasah melakukan perencanaan dengan memperhatikan berbagai pihak yang kemudian dikaji dan pada akhirnya nanti disusun sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).

Perencanaan pembiayaan di madrasah sebagian besar masuk dalam penyusunan RKAM yang disusun secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Fattah bahwa dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas.<sup>15</sup> Itulah sebabnya dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan yang sistematis sebagaimana tercantum dalam undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 48 bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. MI Ma'arif Sutawinangun dalam menyusun rencana anggaran dan belanja madrasah (RKAM) pada prakteknya selalu dilakukan dengan musyawarah yang dihadiri kepala madrasah, guru, karyawan, dan Majelis Madrasah. Hal ini dilakukan agar ketika proses pembelajaran dimulai, segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Ini sejalan dengan yang diungkapkan Harjanto dalam Susilawaty bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup>

Sementara itu proses penyusunan perencanaan pembiayaan, madrasah telah sepenuhnya melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam perencanaan pembiayaan madrasah sebagaimana yang diungkapkan Mulyasa bahwa dalam perencanaan pembiayaan madrasah mencakup dua kegiatan yaitu penyusunan dan pengembangan RAPBS.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaannya mereka melakukan perencanaan pendidikan, pengeluaran dan pendapatan, selain itu mereka juga berusaha melakukan pendekatan partisipatif terhadap masyarakat madrasah. MI Ma'arif Sutawinangun dalam penyusunan anggaran juga menganut prinsip pembagian wewenang. Pelaksanaan pembiayaan dilakukan oleh bendahara madrasah hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Fattah bahwa anggaran harus disusun berdasarkan prinsip pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam manajemen organisasi, adanya sistem akuntansi yang memadai, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi, adanya dukungan dari pelaksana.<sup>18</sup>

Dalam pelaksanaan musyawarah, kepala sekolah dan para wakilnya melakukan tiga perencanaan yaitu: *Pertama*, perencanaan pendidikan kepala madrasah dan para wakinya melakukan kajian terhadap program program yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan. Program program yang direncanakan harus berdasarkan visi, misi dan memperhatikan keadaan madrasah serta kemungkinan yang terjadi pada tahun tahun berikutnya. Hal ini penting karena perencanaan yang tidak berdasarkan visi misi akan menjadikan program yang disusun tidak sesuai dengan yang diinginkan madrasah. Sedangkan apabila program yang disusun tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya terjadi pada madrasah, maka akan membuat perencanaan tidak dapat dilaksanakan

---

<sup>15</sup> Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, 26

<sup>16</sup> Baihaqi. *Manajemen Pembiayaan pada SMKN Aceh Besar*. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 1, No.2, 40

<sup>17</sup> Enco Mulyasa, Enco, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 56

<sup>18</sup> Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, 26

dengan baik karena tidak mendapat dukungan dari sumber daya madrasah. Adapun perencanaan yang tidak memperkirakan masa yang akan datang akan berakibat tidak akan mendapat dukungan pada tahun tahun berikutnya.

*Kedua*, perencanaan pengeluaran. Perencanaan yang dilakukan kepala madrasah dan para wakilnya pada tahap selanjutnya adalah perencanaan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan madrasah dalam melaksanakan program programnya. Perencanaan pengeluaran di MI Ma'arif Sutawinangun ini berdasarkan pada kemungkinan kemampuan madrasah, sedangkan kemampuan keuangan madrasah tergantung pada penerimaan dan pengeluaran yang masuk pada tahun anggaran.

*Ketiga*, perencanaan pendapatan, kepala madrasah dan para wakilnya merencanakan penerimaan dan pengeluaran yang mungkin masuk ke madrasah melalui berbagai segi dalam satu tahun anggaran. Pendapatan madrasah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan program yang disusun madrasah.

Perencanaan terhadap tiga hal di atas yang dilakukan oleh MI Ma'arif Sutawinangun sudah sesuai dengan teori, sehingga menunjukkan bahwa madrasah ini sudah tergolong cukup baik dalam manajemen. Pada data penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa selain menyusun RKAM juga selalu melakukan pengembangannya. Dalam pengembangan rencana kegiatan dan anggaran MI Ma'arif Sutawinangun menggunakan tiga langkah pendekatan yaitu kelompok kerja, kerjasama dan Majelis Madrasah.

Hal ini dilakukan dengan memperhatikan sumber daya yang ada di madrasah, menampung semua aspirasi dan mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Perencanaan yang dibuat oleh madrasah yang memperhatikan pengembangan rencana anggaran dan pendapatan dan belanja madrasah seperti yang dilakukan MI Ma'arif Sutawinangun akan melahirkan perencanaan yang baik diantaranya yaitu: *Pertama*, perencanaan yang dibuat harus memperhatikan dan berdasarkan pada sumber daya yang ada di madrasah. Dengan pengembangan RKAM pada tingkat kelompok kerja maka perencanaan yang dibuat akan lebih bagus karena sesuai dengan kondisi di madrasah.

*Kedua*, perencanaan yang dibuat merupakan perencanaan yang dapat menampung aspirasi. Melalui pengembangan RKAM pada tingkat kerjasama dengan majelis madrasah, maka perencanaan akan sesuai dengan keinginan berbagai pihak. Perencanaan yang dibuat merupakan perencanaan yang mendapat persetujuan dari berbagai pihak. Melalui pengembangan RKAM dengan sosialitas dan legalitas, maka perencanaan yang dibuat diakui keberadaannya oleh berbagai pihak.

Dari uraian di atas maka penulis simpulkan bahwa perencanaan keuangan di MI Ma'arif Sutawinangun sudah berjalan baik dan teratur.

## 2. *Pelaksanaan Keuangan Madrasah*

Pelaksanaan pembiayaan di MI Ma'arif Sutawinangun dilakukan oleh bendahara, hal ini sejalan dengan Mulyasa bahwa sekolah dapat menetapkan bendahara sesuai dengan peran dan fungsinya.<sup>19</sup> Untuk uang yang harus

---

<sup>19</sup> Enco Mulyasa, Enco, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 69



dipertanggungjawabkan ditunjuk bendahara oleh kepala madrasah. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan di MI Ma'arif Sutawinangun disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh ini sejalan yang dikatakan Bafadal bahwa pelaksanaan anggaran dalam setiap personel sekolah adalah semua penggunaan dana yang tersedia harus disesuaikan dengan rencana anggaran yang telah disusun lembaga.<sup>20</sup>

Pelaksanaan keuangan di MI Ma'arif Sutawinangun dibagi dalam dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan. Pemisahan kegiatan penerimaan dan pengeluaran dapat memberikan manfaat antara lain: *Pertama*, mempermudah pembukuan, dengan pemisahan ini akan memudahkan bendahara penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam penerimaan maupun pengeluaran uang. *Kedua*, memudahkan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dan pemeriksaan dalam melihat aliran dana di MI Ma'arif Sutawinangun lebih mudah dilakukan dengan adanya pemisahan dana penerimaan dan pengeluaran.

Dengan adanya pemisahan antara dana penerimaan dan pengeluaran maka akan memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk melihat aliran dana di MI Ma'arif Sutawinangun. Penerimaan dana pendidikan ditentukan oleh besarnya dana yang diterima lembaga dari setiap sumber dana Dalam Undang Undang No 20 tahun 2003 pasal 46 disebutkan bahwa pendanaan pendidikan di Indonesia menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.<sup>21</sup> Di MI Ma'arif Sutawinangun dana diperoleh dari pemerintah dan Majelis Madrasah. Pemerintah merupakan penyandang dana tetap yang dikelola madrasah untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam penerimaan dana pendidikan MI Ma'arif Sutawinangun telah menunjuk bendahara II untuk membuat pembukuan antara lain: (a) Buku harian, buku ini berisi nama penyeter, kelas guna membayar dan jumlah yang disetorkan serta waktu penyeterannya. Disini dapat dilihat format bukunya sederhana dan mudah dipahami. Format seperti ini memudahkan madrasah dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Apalagi jika ada kronologi kejadiannya akan lebih memudahkan dalam menggali informasi. (b) Buku Rekap, buku ini berisi kumpulan catatan harian, dari buku ini dapat diketahui jumlah dana yang masuk serta dapat diketahui keadaan dana yang ada di MI Ma'arif Sutawinangun dan dapat dibandingkan dengan dana yang ada di bendahara umum, sehingga dana yang masuk dapat dikontrol. (c) Buku Setor, di MI Ma'arif Sutawinangun, buku ini digunakan bendahara madrasah untuk mencatat penyeteran dana yang telah dilakukan kepada bendahara. Dari buku ini menjadi bukti setoran dana yang telah dilakukan kepada bendahara. Dari buku ini menjadi bukti setoran dana yang telah dilakukan bendahara madrasah kepada ke kepala madrasah agar setiap dana yang masuk dapat dikontrol.

Pembukuan terhadap penerimaan di MI Ma'arif Sutawinangun dilakukan dalam format sederhana dan mudah dimengerti sehingga berbagai

---

<sup>20</sup> Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 54

<sup>21</sup> Mulyono, *Mewujudkan Keunggulan Madrasah*, Vol.2, No.1, Tahun 2009, 1

pihak yang berkepentingan dapat memahaminya. Dalam pelaksanaan keuangan di MI Ma'arif Sutawinangun dalam kegiatan pengeluaran dilakukan oleh bendahara I yang menangani pengeluaran dana pendidikan di madrasah.

Dalam pelaksanaan pembiayan di madrasah subjek penelitian, laporan pelaksanaan pembiayaan disusun dengan baik sebagai bahan pertanggungjawaban. Ini sesuai dengan Bafadal bahwa semua keuangan harus dilengkapi dengan kwitansi pengeluaran, semua penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam rangka mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban, semua penggunaan dana harus dibukukan secara seksama dan berkesinambungan melalui proses pembukuan yang berlaku.<sup>22</sup> Langkah langkah pengeluaran dana adalah sebagai berikut: pengajuan permintaan yang ditulis dalam lembar permintaan pengeluaran dana kepada kepala madrasah; setelah mendapat persetujuan kemudian bendahara madrasah mengecek keabsahan lembar permintaan tersebut yakni sudah disetujui oleh kepala madrasah atau belum; setelah diketahui keabsahannya maka dilakukan pengajuan permintaan pengeluaran dana kepada bendahara; bendahara madrasah memberikan kepada yang bersangkutan untuk meminta pengeluaran dana agar dapat dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.

Melakukan analisis dan pengambilan keputusan merupakan tugas fungsional bagian keuangan untuk melaksanakan tugas itu maka bendahara harus berpatokan pada rencana anggaran yang tepat, mengestimasi secara tepat nilai nominal sumber keuangan, mencermati tentang pengaruh waktu dan ketidakpastian, memperhitungkan efisiensi pengaruh waktu, memperhitungkan efisiensi pengeluaran secara cermat (Baihaqi, 2012: 43).<sup>23</sup>

Pembiayaan madrasah berasal dari pemerintah pusat, dan daerah yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, orang tua atau siswa dan masyarakat. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan bagian yang tak terpisahkan dalam pendidikan. Oleh karena itu madrasah selalu merencanakan anggaran dengan matang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Biaya madrasah terdiri dari biaya rutin dan biaya operasional, biaya rutin selalu lancar dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji pegawai sedangkan biaya operasional dikeluarkan sekolah untuk perbaikan dan rehab gedung serta fasilitas dan alat alat pengajaran.

Pengeluaran dana di MI Ma'arif Sutawinangun melalui beberapa tahap yang melibatkan penanggungjawab atau yang mengajukan permintaan pengeluaran, bendahara madrasah bagian pengeluaran dan kepala madrasah. Prosedur ini biasa dikatakan panjang dan lama, namun dana ini agar dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan baik, sehingga berbagai pihak yang berkepentingan akan dapat mengetahui penggunaan dana yang ada apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan.

---

<sup>22</sup> Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 61

<sup>23</sup> Baihaqi. *Manajemen Pembiayaan pada SMKN Aceh Besar*. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 1, No.2, 43

Dalam pembukuan pengeluaran di MI Ma'arif Sutawinangun dilakukan secara kronologis pada setiap transaksi yang dilakukan dalam setiap bulan, yaitu sesuai dengan urutan tanggal transaksi pada bulan tersebut.<sup>24</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembukuannya. Pengeluaran dana yang dilakukan setelah ditulis secara kronologis kemudian dicatat dalam buku catatan pengeluaran menurut jenis pengeluaran, yaitu seperti kebutuhan guru, pembelian perlengkapan belajar mengajar yang kemudian data pengeluaran tersebut dimasukkan dalam laporan bulanan kepala madrasah, dari sini dapat dimengerti bahwa pembukuan yang dilakukan untuk memudahkan pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban yakni melalui pembukuan atau pencatatan pengeluaran harian dan bulanan yang kemudian dituangkan dalam laporan harian, bulanan, tahunan.

Selain itu pembukuan pengeluaran dicatat berdasarkan jenis pengeluaran akan memudahkan bagi pengawas dan pemeriksa untuk mengetahui besarnya pengeluaran untuk berbagai jenis kebutuhan madrasah, sehingga pengeluaran dapat dikontrol sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dari uraian di atas penulis dapat simpulkan bawa pelaksanaan keuangan madrasah di MI Ma'arif Sutawinangun sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan kinerjanya. Pembiayaan di MI Ma'arif Sutawinangun sudah dikelola secara professional baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian yang melibatkan peran majelis madrasah. MI Ma'arif Sutawinangun sebagai salah satu madrasah yang disukai banyak kalangan di seputar kota Cirebon dan memiliki reputasi yang bagus dalam pandangan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka peningkatan pelayanan, fasilitas dan kegiatan ekstra pendukung lainnya, maka madrasah harus memiliki sumber alternatif lainnya tidak hanya menunggu dana dari pemerintah.

### 3. *Evaluasi*

Evaluasi sebagai salah satu langkah dalam tahapan manajemen MI Ma'arif Sutawinangun difungsikan sebagai langkah dalam mengontrol perencanaan dan pelaksanaan keuangan madrasah. Evaluasi yang dilakukan adalah dengan pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan terhadap barang barang dan pelaksanaan keuangan madrasah. Sedangkan pemeriksaan dilakukan terhadap anggaran, kas dan barang. Pemeriksaan terhadap anggaran di MI Ma'arif Sutawinangun dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan madrasah dalam melakukan perencanaan penerimaan dan pengeluaran sehingga dari sini pihak pihak yang berkepentingan dapat melakukan pengontrolan terhadap penerimaan dan pengeluaran dari hal hal yang tidak berguna maka dengan pemeriksaan terhadap anggaran ini akan menghindarkan dari anggaran yang tidak perlu dan tidak bermanfaat.

Sedangkan pemeriksaan terhadap kas bertujuan untuk menguji kebenaran jumlah dana yang ada dengan membandingkan jumlah dana yang seharusnya ada dengan dana yang ada melalui catatan. Di MI Ma'arif Sutawinangun pemeriksaan terhadap kas dilakukan oleh kepala madrasah dan majelis madrasah dengan melihat catatan dana yang masuk yang dipegang oleh

---

<sup>24</sup> Doc. Pembukuan MI Maarif 2017

bendahara III untuk mengetahui jumlah dana yang diterima madrasah dan terhadap catatan dana yang sudah dikeluarkan dan mengetahui jumlah dana yang masih ada.

Pemeriksaan yang dilakukan ini akan dapat mengontrol pengeluaran berikutnya, yang berarti bahwa pengeluaran berikutnya harus memperhatikan pengeluaran yang sudah dilakukan, sehingga tidak terjadi pengeluaran yang tidak sesuai dengan perencanaan. Adapun pemeriksaan terhadap barang yang dilakukan di madrasah terhadap jenis, jumlah dan fungsi merupakan pemeriksaan yang baik dan sesuai dengan teori pemeriksaan terhadap barang yang tercantum dalam bab sebelumnya.

Dari keterangan tersebut diketahui bahwa evaluasi yang dilakukan oleh MI Ma'arif Sutawinangun sudah tergolong baik, hal ini dapat dilihat seperti dari pemeriksaan yang dilakukan yakni sudah sesuai teori yang tercantum dalam bab 2 yaitu terhadap anggaran, kas dan barang. Selain itu evaluasi juga dilakukan dengan memeriksa laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara, dan madrasah juga telah melibatkan masyarakat dan orang tua siswa yang bergabung dalam majelis madrasah dalam kegiatan pemeriksaan dan pengawasan. Hal ini diperlukan karena pendapatan yang diterima madrasah berasal dari mereka, dan sebagai salah satu bentuk menjadikan mereka merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap madrasah ini.

Dalam pertanggungjawabannya, MI Ma'arif Sutawinangun melakukan pertanggungjawaban ke dalam dan keluar. Pertanggungjawaban ke dalam dilakukan oleh dua pihak yaitu: *Pertama* bendahara selaku pelaksana pembiayaan pendidikan di madrasah melaporkan kepada kepala madrasah selaku pimpinan. *Kedua* dilakukan kepala madrasah selaku pimpinan pelaksanaan keuangan madrasah di MI Ma'arif Sutawinangun kepada majelis madrasah. Adapun pertanggungjawaban keluar dilakukan dengan menyediakan informasi tentang pendapatan dan penggunaan dana yang diperoleh kepada orang tua peserta didik. Data tersebut menunjukkan bahwa MI Ma'arif Sutawinangun melakukan pertanggungjawaban dengan baik, sehingga perlu dipertahankan. Informasi yang disediakan untuk orang tua merupakan bentuk pertanggungjawaban, tinggal orang tua peserta didik peduli atau tidak dengan hal ini. Kepedulian ini perlu dipupuk dalam rangka mengikutsertakan orang tua dalam program pengelolaan madrasah. Evaluasi di madrasah ini juga dilakukan dengan memeriksa pelaksanaan pembukuan keuangan yang dilakukan oleh bendahara. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya mengenai dana saja yang diperiksa, namun juga dalam pembukuannya. Dalam pemeriksaan di MI Ma'arif Sutawinangun ini dilakukan dengan menilai pembukuan yang dibuat dengan indikator yang dinilai adalah mengenai kerapian, keteraturan dan kelengkapan serta kesesuaian anggaran. Keempat hal tersebut jika dilakukan maka pembukuan dianggap baik. Ini menunjukkan bahwa madrasah menyiapkan diri bukan hanya dalam mengelola dana saja, namun juga dalam pembukuannya.

#### **D. Implikasi peningkatan mutu lembaga pendidikan dengan manajemen pembiayaan di MI Ma'arif Sutawinangun**

Upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Madrasah merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya sumber daya manusia yang unggul dipengaruhi pula oleh faktor yang menunjang pembelajaran di madrasah. Faktor tersebut berupa guru yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, juga penunjang pembelajaran siswa berupa kegiatan ekstrakurikuler. Semua itu tidak akan terpenuhi jika tidak adanya biaya yang mencukupi kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Maka dari itu biaya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya demi kelancaran dan peningkatan mutu di madrasah. Pengelolaan pembiayaan di MI Ma'arif Sutawinangun dikelola langsung oleh kepala madrasah dibantu oleh bendahara, sehingga kepala madrasah mengetahui pengeluaran dan penerimaan keuangan secara langsung. Selain itu kepala madrasah bertugas pelaksana bagaimana meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan mengkoordinir kegiatan-kegiatan demi berlangsungnya peningkatan mutu pendidikan melalui pembiayaan yang telah diatur dalam RKAM. Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah perlu memperhatikan tiga komponen penentu keberhasilan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang membutuhkan perhatian pengalokasian dana antara lain:

##### *1. Siswa*

Dalam usaha peningkatan mutu pendidikan siswa merupakan sumber daya terpenting dalam proses pembelajaran dan juga kegiatan sekolah. Wahana yang paling tepat untuk melibatkan para siswa adalah kegiatan-kegiatan diluar kurikuler atau ekstrakurikuler.<sup>25</sup> Semakin banyak kegiatan yang diikuti siswa maka akan menambah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mempertajam pemahaman terhadap keterkaitan dengan mata pelajaran kurikuler. Para siswa dibina kearah mantapnya pemahaman, kesetiaan dan pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, watak dan kepribadian bangsa, budi pekerti luhur, kesadaran berbangsa dan bernegara, keterampilan dan kemandirian, olahraga dan kesehatan serta persepsi, apersepsi dan kreasi seni.<sup>26</sup> Ekstra kurikuler yang ada di MI Ma'arif Sutawinangun dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada awal tahunnya oleh penanggungjawab yang mengatur semua kegiatan ekstrakurikuler.

Ekstrakurikuler yang ada di MI Ma'arif Sutawinangun antara lain pramuka, drum band, kaligrafi, futsal, komputer, seni baca Al Qur'an, tahfizh, sains, dan matematika. Juga ada organisasi QNS yang khusus mengkoordinir kegiatan ekstra kurikuler bahasa Arab. Di MI Ma'arif Sutawinangun memang yang diutamakan agar siswa-siswinya dapat berbahasa Arab dengan lancar. Selain kursus bahasa Arab juga ada kursus bahasa Inggris dalam kegiatannya kursus bahasa Inggris terdapat *Vocab Game* yaitu kegiatan yang memadukan

<sup>25</sup> Wahyu Sumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2008), 239

<sup>26</sup> Wahyu Sumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, 241-242

permainan dan berbahasa Inggris. Kegiatan ini dimaksudkan agar siswa dapat belajar bahasa Inggris dengan bermain dalam menggunakan bahasa Inggris. Semua siswa di MI Ma'arif Sutawinangun diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dikarenakan kegiatan ekstrakurikuler menunjang pembelajaran dan juga meningkatkan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Mengingat begitu pentingnya ekstrakurikuler dalam meningkatkan kualitas siswa, untuk itu pengelola madrasah memberikan anggaran kegiatan untuk menunjang tercapainya proses kegiatan agar berjalan dengan lancar. Tanpa adanya pengalokasian dana yang cukup pelaksanaan kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MI Ma'arif Sutawinangun ini telah mendapat pengalokasian dana yang telah tercantum dalam RKAM.

## 2. *Guru*

Guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas peserta didik. Guru mempunyai peranan penting menjadi media dalam proses pembelajaran peserta didik. Mutu peserta didik tergantung bagaimana peran guru dalam memberikan pembelajaran yang tepat kepada mereka. Selain itu jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh guru juga mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Di MI Ma'arif Sutawinangun semua guru berpendidikan sarjana, dan ada diantaranya yang melanjutkan ke S2 di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Untuk meningkatkan profesionalisme para guru MI Ma'arif Sutawinangun juga dilibatkan dalam program kualifikasi peningkatan profesionalisme mutu guru melalui program pelatihan dan workshop, KKG, dan membekali para guru kursus pendalaman Membaca Al-quran metode Qiro'ati.

Untuk ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas melaksanakan KBM, semua pendidik dan tenaga kependidikan MI Ma'arif Sutawinangun, di ikut sertakan dalam keanggotaan Asuransi Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Sehingga jika ada guru yang mengalami kecelakaan dalam waktu melaksanakan tugas, maka akan mendapat santunan dari BPJS ketenagakerjaan seperti yang sudah diatur pemerintah saat ini.

## 3. *Sarana dan prasarana*

Faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu proses pembelajaran salah satunya adalah sarana dan prasarana pendidikan. Agar sarana prasarana pendidikan dapat terus berdaya guna aktif dalam proses pembelajaran pihak madrasah harus terus melakukan perkembangan dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman, yang semakin canggih dan teknologi semakin berkembang terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan sekarang ini terutama proses pembelajaran memerlukan sarana dan prasarana pendidikan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran dan untuk mengoptimalkan kreatifitas siswa. Sarana dan prasarana pendidikan yang canggih serta mengikuti kemajuan zaman adalah harapan dan keinginan setiap madrasah. Untuk mewujudkan harapan dan keinginan tersebut, pihak madrasah haruslah mempunyai dana yang cukup banyak dalam pengelolaan sarana dan

prasarana madrasah. Madrasah perlu mengelola sarana dan prasarana dengan sebaik baiknya sebagai penunjang pelaksanaan proses pembelajaran.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menunjang proses belajar dan mengajar. Dalam proses pembelajaran sarana dan prasarana sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, membantu memudahkan belajar bagi siswa. Untuk dapat menarik perhatian peserta didik lebih besar, untuk itu sarana dan prasarana yang ada di MI Ma'arif Sutawinangun perlu mendapat perhatian pengelolaan pengalokasian dan untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang baik sehingga dapat menunjang proses pembelajaran peserta didik. Pengalokasian dana untuk pengelolaan sarana dan prasarana di MI Ma'arif Sutawinangun telah tercantum dalam perencanaan RKAM.

Agar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat mempengaruhi mutu proses pembelajaran perlu partisipasi aktif dari pendidik dan peserta didik, serta perlunya dukungan dari kepala madrasah untuk mewujudkannya. Sarana dan prasarana pendidikan yang sudah ada perlu dimaksimalkan penggunaannya karena dengan demikian sarana dan prasarana tersebut akan terus berdaya guna aktif terhadap proses pembelajaran.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam melalui manajemen pembiayaan (studi kasus pada MI Ma'arif Sutawinangun ) dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*; Strategi yang dilakukan MI Ma'arif Sutawinangun untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan; a). Membentuk tim peningkatan mutu yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi mutu pendidikan di MI Ma'arif Sutawinangun, b). Penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan SNP yang ditetapkan pemerintah, c). Melakukan evaluasi diri setiap bulan melalui rapat rutin yang dipimpin Kepala Madrasah, d). Program skala prioritas seperti: Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, seminar, workshop, KKG, melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, studi banding, dll. Peningkatan prestasi akademik dan prestasi non-akademik melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan pendidikan luar sekolah (PLS). Peningkatan sarana prasana yang menunjang kegiatan belajar mengajar dan penguasaan teknologi. Adanya pelaporan segala kegiatan di akhir tahun pelajaran.

*Kedua*, Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif Sutawinangun dalam proses perencanaan pembiayaan telah melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak. Penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan yang telah sesuai dengan program pembiayaan yang telah ditetapkan merupakan faktor kunci terlaksana proses pendidikan di madrasah. MI Ma'arif Sutawinangun cenderung lebih memprioritas kebutuhan yang menunjang peningkatan mutu pendidikan agar pembiayaan dapat berjalan efektif dan efisien.

## **Daftar Pustaka**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

- Armida, “*Model Pembiayaan di Indonesia*”, Media Akademika, Volume 26, Nomor 1, Januari 2011, 5.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Kalimah. Cet. III, 2001)
- Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Bafadal, Ibrahim, *Pengelolaan Keuangan Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Baihaqi, Manajemen Pembiayaan pada SMKN Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 1, No.2, November 2012, 40
- Fajar, A. Malik. *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999)
- Fatah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- , *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, (Bandung: Pustaka Bai Quraisy, 2007)
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000)
- Langgulung, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1998)
- Marus Suti, *Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Daerah*. *Jurnal MEDTEK*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2011, 5.
- Martin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2004)
- Mukhtar, Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Mulyasa, Enco, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)
- Mulyono, *Mewujudkan Keunggulan Madrasah*, Vol. 2, No.1. Tahun 2009
- Riduwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Al-Fabeta, 2014)
- Soetopo, Hendyat, *Pendidikan dan Pembelajaran*, (Malang, UMM Malang, 2005)
- Steenbrink, Karel A, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung. Alfabeta, 2016)
- Sumidjo, Wahyu, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003